

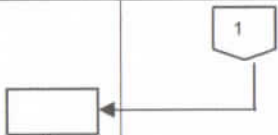


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN SOPPENG
BIDANG HUMAS, PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI
SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MEDIA

Nomor SOP	2
Tgl Pembuatan	2 Januari 2017
Tgl Revisi	2 Juli 2018
Tgl Efektif	2 Januari 2020
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SOPPENG, <u>Drs. SARIANTO, M.Si</u> Nip. 19620424 199103 1 011
Nama SOP	PENGELOLAAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Soppeng.2. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/PER-BUP/XII/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.3. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng.	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Sarjana2. Menguasai Tata Pembukuan3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik.2. SOP Pelayanan Informasi permohonan Publik.3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik.5. SOP Pendokumentasian informasi publik6. SOP Pendokumentasian informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop dan Printer2. Lembaran Kerja dan rencana Kerja3. Term of Reference4. Alat Tulis Kantor5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dibuat maka Pengelolaan Sengketa Informasi Publik akan terhambat.	- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	<pre> graph TD A([Pemohon Informasi]) --> B[Atasan PPID] B --> C[Tim Fasilitasi Sengketa] C --> D[Komisi Informasi] </pre>				1. Formulir Pengajuan Keberatan Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh 2. Foto copy atau scan identitas diri (NIK) dan Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.	Pada hari kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan foto copy/scan identitas diri	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama. Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di PPID Utama dan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan			<pre> graph TD E[Tim Fasilitasi Sengketa] --> F[Komisi Informasi] F --> G[Output] </pre>				Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal Informasi yang disengketakan dan diajukan Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya	

3	<p>Tim Fasilitas Sengketa Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID 								
4	<p>Upaya penyelesaian Sengketa</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi 			